

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKAR RAYA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG**

**Alfensus Marken John Tedy:** Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.Pontianak. 2013. E-mail : [teddykayong@yahoo.com](mailto:teddykayong@yahoo.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran masyarakat untuk pembangunan fisik partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Dalam pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Barat masih banyak kendala-kendal. Salah satunya itu dikarenakan partisipasi masyarakat di perdesaan tersebut belum memenuhi harapan seperti yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa. Disarankan untuk pemerintah desa dan masyarakat desa untuk saling mendukung dalam setiap pembangunan fisik yang akan ada dilaksanakan di desa. Kepala desa hendaknya memberikan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat didalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan pembangunan yang ada. Kepala desa Hendaknya berkerjasama dengan masyarakat sehingga dengan sendirinya kesadaran masyarakat bisa berperan terhadap pembangunan fisik yang ada. Kepala desa hendaknya lebih tegas dalam membuat aturan untuk menjaga dan memfungsikan setiap pembangunan fisik yang ada.

Kata Kunci : Partisipasi perencanaan, Partisipasi pelaksanaan, Pembangunan Fisik

### Abstract

The purpose of this researeh is to know the role of society to the physicel consruction of society participate in the planning and execution on the Mekar Raya villge of Simpang Dua subdistrict in Ketapang regen. By using qualitative method within descriptive approach on physicel coustruction in west borneo province still a lot of constraints. One of these is couused the partcipate of society in the village is not to fill expectation that is expected by society and government. Based on this researeh, so to infrove the partcipate of society in physicel construction that will be done in the village. The village leander is desired to give the socialitation enough to society in planning, execution and contruention advence. The village leader is desidr cooperative wilth the pople so by itself realization of society can role to the physicel construction. The villages leander desired more resutute to make rules to keap and to function sical construction.

Key word : participate planning, participate execution, sical construction

### **A.PENDAHULUAN**

Usaha untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia telah menentukan langkah-langkah atau kebijakan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus, dan terencana. Di

dalam program-program pembangunan yang telah disusun diharapkan mendapat dukungan dari segenap masyarakat dan pelaksanaannya dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. Dalam pembangunan di Indonesia adalah salah satu contohnya pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah perubahan secara berencana dan dilakukan secara

berencana pula dari keadaan yang kurang baik, menuju pada keadaan yang lebih baik.

Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang adalah salah satu desa yang merupakan pusat pembangunan di Kabupaten Ketapang. Untuk melaksanakan pembangunan tentu banyak kegiatan Pemerintah Desa Mekar Raya yang akan dilaksanakan di ruang lingkup desa. Ruang lingkup desa ini misalnya masyarakat, wilayah desa dan perasarana desa. Untuk melaksanakan pembangunan ini Pemerintah Desa Mekar Raya harus dapat memberdayakan unsur-unsur manusianya. Unsur manusia dalam suatu desa yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat desa tersebut. Dalam suatu pembangunan diperlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDA dan SDM) yang berkualitas. Di dalam pelaksanaan pembangunan tentu adanya suatu yang mengatur SDA dan SDM tersebut yaitu Kepala desa dan Tokoh-tokoh masyarakat. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya tidak mudah, harus adanya strategi dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat pendukungnya. Strategi tersebut haruslah tepat dengan sasaran pembangunan yang dilakukan di dalam keperluan masyarakat, salah satu strategi yang harus di siapkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut adalah partisipasi masyarakat. Adapun yang dapat dilakukan Pemerintah Desa Mekar Raya untuk mendapatkan suatu pembangunan desa dengan melakukan musrembangdes yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi awal, peneliti dapatkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang masih banyak yang mengalami kendala-kendala. Ini dapat dilihat dari kerjasama masyarakat dengan pemerintah masih kurang sehingga proses partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Dimana jika ada perencanaan pembangunan daerah masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyuluhan, hanya sebagian masyarakat saja maka timbulnya pembangunan fisik yang dibangun pemerintah tidak semuanya yang di harapkan dan di kehendaki oleh masyarakat Desa Mekar Raya.

Selain itu masyarakat tidak ikut terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang sedang berjalan, itu bisa terlihat dari pembangunan yang sedang berjalan di desa masih banyak tenaga kerja yang diambil dari luar daerah desa, hanya sedikit sekali masyarakat Desa Mekar Raya yang ikut terlibat di dalam pengerjaan pembangunan tersebut. Padahal masyarakat desa banyak yang bisa dan mempunyai keterampilan di dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah, sehingga banyak pembangunan yang dilaksanakan di Desa Mekar Raya jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga pembangunan fisik yang sudah ada tapi tidak dirawat dan difungsikan dengan baik. Ini bisa dilihat dari jembatan yang rusak, jalan yang berlubang, bangunan pemerintah yang rusak dan banyak bangunan-bangunan yang memiliki fungsi penting bagi warga masyarakat setempat menjadi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh lain dapat dipaparkan yaitu kerja bakti desa bisa terlihat dari sebagian kecil saja dari keberadaan masyarakat yang ikut serta, sudah dilakukan pemberitahuan baik secara lisan dan tertulis. Melihat kenyataan dilapangan, bagaimana pembangunan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan atau memberikan gambaran tentang rendahnya partisipasi masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan khususnya dalam pembangunan fisik. Dikatakan demikian karena jika disadari bahwa pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka seharusnya masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut.

## **B. KONSEP PEMBANGUNAN FISIK BERTARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

Pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan suatu upaya perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan semula atau dengan kata lain pembangunan suatu usaha yang dilakukan agar hari esok lebih baik dari hari kemarin ataupun hari ini.

Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses

pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan. Keadaan yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara.

Campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi disamping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, pada kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap.

Pembangunan desa memiliki makna yang sangat luas yaitu mencangkup atau meliputi pembangunan apa saja yang dilaksanakan di tingkat desa. Berarti dalam meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat desa atau meliputi apa saja yang berkaitan dengan hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang telah ditentukan oleh hukum dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul.

Sehubungan dengan uraian di atas maka pembangunan desa berhasil dengan baik dan mencapai sasaran yang dikehendaki, maka dalam hal ini kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab, mengingat kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di tingkat desa. Sebagai pemimpin desa yang melaksanakan pemerintah desa, tidak serta merta menjalankan tugas-tugas pokoknya di pemerintah desa, melainkan menjalankan tugas

sebagai pembina masyarakat dalam rangka menciptakan tarap hidup yang sejahtera. Pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

Menurut Basrowi (dalam Widya, 2008:73) partisipasi dapat di bedakan menjadi dua (2) yaitu partisipasi non fisik dan partisipasi fisik. Partisipasi non fisik adalah keikutsertaan masyarakat dunia usaha dalam menentukan arah pembangunan nasional dan meratanya animo masyarakat menuntut pembangunan secara mandiri, sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan mengarahkan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sedangkan partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan pembangunan dengan wujud yang tampak.

Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu :  
"Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "participation" adalah hal mengambil bagian".

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Tjokroamidjojo, (1996:207) mengemukakan dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan  
Dalam tahap perencanaan, masyarakat sekaligus diajak ikut serta dalam keputusan, mengajukan usul atau rencana program pembangunan, untuk kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan  
Dalam tahap pelaksanaan ini, masyarakat ikut terlibat dalam program pembangunan yang sedang berjalan. Keterlibatan masyarakat ini baik secara fisik maupun non fisik. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam penyusunan rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sarana-sarana rencana tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan merupakan unsur terpenting, dimana hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk menyukai hasil pembangunan yang di harapkan masyarakat. Tren berikutnya memandang perencanaan sebagai media komunikasi baik untuk pencarian consensus maupun untuk menangani konflik. Pemahaman bersama diantara para pemangku kepentingan menmemegang peranan kunci. Di dalam teori ini, dipercaya bahwa disamping benturan kepentingan, masih terdapat kesamaan visi yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai kepentingan bersama. (Mantysalo, 2005:10).

Dalam mengembangkan konsep perencanaan kolaboartif dalam pembangunan masyarakat desa Bali pegunungan, kerangka preposisi yang dikembangkan oleh Godschalk (2004:5-13) dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran. Secara tentatif terdapat 12 preposisi yang terkonsentrasi menjadi 4 kategori untuk mengembangkan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu:

#### *Planning Strategy*

### **Alfensus Marken John Tedy**

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

1. semakin luas dan intens basis partisipasi masyarakat dalam perencanaan suatu kawasan, maka akan semakin besar kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan public.
2. semakin luas basis partisipasi masyarakat, semakin potensial pengaruh yang dapat dihasilkan oleh perencana untuk mempengaruhi perubahan social.
3. semakin beragam latar belakang masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perencanaan semakin inovatif proposal yang mampu dilahirkan.
4. semakin terdesentralisasi kelompok masyarakat yang menjadi klien maka semakin banyak inovasi yang dapat diadopsi.
5. semakin tersentralisasi dan komprehensif proses pengambilan keputusan, maka inovasi yang dihasilkan akan semakin rendah.

#### *Planning Method*

1. goals perencanaan local akan semakin mengerucut ke arah keinginan masyarakat jika didiskusikan secara luas oleh partisipan dan selanjutnya dikomunikasikan dengan badan pengambil keputusan.
2. aliran pengambilan keputusan yang bersifat satu arah akan mengurangi ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. semakin banyak teknik konsultasi public yang dipergunakan maka akan semakin meningkatkan daya tarik dan dukungan masyarakat.

#### *Planning program/content*

1. semakin banyak proses perencanaan melibatkan partisipasi public maka akan meningkatkan kepeduliannya terhadap manfaat perencanaan sebagai kekuatan demokratis kan kekuatan masyarakat
2. perencanaan partisipatif terbuka terhadap proposal yang bersifat radikal untuk menghasilkan solusi inovatif untuk memecahkan permasalahan lokal.
3. semakin luas batasan peencanaan yang disusun dan semakin lama timeline yang buat maka akan semakin berkurang manfaat yang akan dihasilkan.

#### *Location of planning decision system*

1. relevansi perencanaan dan pengaruhnya akan sangat tergantung pada sebaran anggota masyarakat yang dilibatkan

tentunya semua ini tidak lepas dari komunikasi di dalam melaksanakan proses partisipasi yang mana menurut Roger,” komunikasi adalah suatu proses dimana dua atau lebih membentuk atau melakukan petukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Kemudian menurut Koontz (1990:186) mengemukakan bahwa dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan efektif diperlukan hal-hal berikut:

1. Memperjelas ide-ide sebelum dikomunikasikan
2. Mengkaji tujuan komunikasi
3. Memahami lingku, fisik dan manusiawi pada saat berkomunikasi
4. Dalam merencanakan komunikasi, konsultasikan dulu dengan orang lain untuk memperoleh dukungan mereka dan untuk memperoleh fakta-fakta
5. Memperhatikan isi dan tekanan pesan
6. Komunikasi memerlukan tindak lanjut
7. Tindakan harus srsasi dan sejalan dengan komunikasi

Pendapat diatas menyimpulkan bahwa dalam berkomunikasi diperlukan langkah-langkah untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar maka harus melakukan interaksi terhadap orang lain yang secara naruni akan bersosialisasi kepada orang lain. Oleh karena berkomunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial yang berlangsung atau bejalan antara manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi erat kaitanya dengan proses pembangunan, tanpa adanya partisipasi yang aktif, pembangunan yang telah direncanakan akan terhambat, dan itu dapat berkakibat buruk bagi semua pihak masyarakat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran pembangunan karena pada dasarnya pembangunan adalah untuk masyarakat apabila pemerintah telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengemukakan aspirasi/usul dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni

meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya bagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat. Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan teori pendukung yang telah di paparkan, maka penulis menggunakan teori utama untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkembang dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Tjokroamidjojo, (1996:207)

### C. METODE PENELITIAN

Rancangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Dalam rancangan ini peneliti berusaha dapat memberikan

deskriptif yang jelas berkaitan dengan fokus kajian yakni hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk pembangunan fisik di desa mekar raya kecamatan simpang dua kabupaten ketapang namun disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pertanyaan penuntun. Peneliti sendiri langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Baik dari Kepala Desa mau pun masyarakat di Desa Mekar Raya.

Subjek penelitian/informasi terdiri dari (a) Kepala Desa Mekar Raya. (b) Anggota Masyarakat (6 orang). (c) Tokoh-tokoh Masyarakat (2 orang). (d) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (e) RT/RW Desa Mekar Raya (5 orang).

Setelah data terkumpul dilapangan, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian di analisa secara kualitatif. Artinya penganalisaan data berdasarkan uraian kalimat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Perencanaan.

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik berupa tenaga, pikiran, dan berupa bantuan materi atau uang serta rela meluangkan waktu agar dapat menunjang proses pembangunan di desanya.

Dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Mekar Raya itu sendiri pertama dimulai dari sosialisasi terhadap program pembangunan fisik tersebut pada tiap-tiap dusun dimana dalam hal ini dusun yang dimaksud yaitu Dusun Banjur, Dusun Karap, Dusun Kampera. Dimana sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian disosialisasi kembali pada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut kemudian dirapatkan melalui musrenendes dimana masyarakat desa ini diikuti oleh

masyarakat yang diwakili oleh ketua RT, Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat hal tersebut karena kegiatan pembangunan fisik tersebut berkaitan dengan masyarakat dan seluruh kegiatan pun di serahkan kepada masyarakat pula.

Dalam perencanaan tentunya ada perencanaan partisipatif dimana dalam pengambilan keputusan melibatkan unsur masyarakat serta pemerintah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan fisik di Desa Mekar Raya memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, terutama sekali yang diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Kualitasnya itu sendiri dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat, gagasan, usulan, serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Mekar Raya, dengan pertanyaan bagaimana bapak menjalankan perencanaan pembangunan fisik di desa?....

*“... oko ngelaku barencana pembangunan di desa, kusus neh Desa Mekar Raya de’ngan ngelaku musrenbangdes. De’ngan nguna’ng aparatur pemerintah desa, BPD, padak onya taok pande aba padak onya yang aba pembangunan fisik di desa”.*

[“... saya melakukan perencanaan pembangunan di desa, khususnya Desa Mekar Raya dengan melakukan musrenbangdes. Dengan mengundang aparatur pemerintah desa, BPD, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan fisik di desa”.]

Bagaimana cara bapak mengundang aparatur pemerintah desa, BPD dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan fisik tersebut?

*“... oko nguna’ng padak onya muntuh ba monik ka rumah sik’o-sik’o yang aba dalam pembangunan mun denak madeh di rumah ko ba pising ka denak dipah ata’u bapising ka onya rumah neh”.*

[“...saya mengundang mereka dengan datang kerumah masing-masing yang terlibat di dalam

pembangunan dan jika mereka tidak ada di rumah saya menyampaikan pesan ke tetangga atau orang yang ada di rumah bersangkutan”].

Dari jawaban Kepala Desa Mekar Raya penulis bisa menyimpulkan bahwa cara kepala desa untuk melaksanakan perencanaan dalam pembangunan fisik di Desa Mekar Raya sudah benar. Namun cara kepala desa dalam mengundang masyarakat atau pun pihak yang terlibat di dalam perencanaan pembangunan fisik seharusnya dengan undangan resmi bukan dari pesan mulut aja. Menurut saya ini bisa terjadi dikarenakan kebudayaan yang biasanya untuk mengumpulkan masyarakat dengan pesan mulut aja.

Dengan pertanyaan, bagaimana keadaan masyarakat di dalam pertemuan di saat pertemuan berlangsung ?...

*“... kada'ng meleh ngelaku neh kare'na bokah oya ngo'to me nga'reti dan paham nyak onih pembangunan fisik e'nto na'rencana. Nyan panye'bab neh padak onya me ten'tu taok berpartisipasi dalam mun'nyok ide, pamikir dan tenaga. Ta pe'rati kah kudu onya jak yang mampu munyukan ide, ka'luba neh ngo'jab nam kalo odeh sosialisasi perencanaan pembangunan kusus neh pembangunan fisik desa atau pun di dusun. Padahal pamarinta'h baharap pe'nuh masayakat aba nyak perencanaan pembangunan gek pamarinta'h desa uleh membangun wilayah kusus neh Desa Mekar Raya, sesuai ka maok n'ya desa”.*

[“...Terkadang susah diterapkan karena sebagian masyarakat tidak mengerti dan paham untuk apa pembangunan fisik ini di rencanakan. Itu di sebabkan kurang berperannya masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemberian ide, pikiran dan tenaga. Bisa dilihat dari berapa masyarakat aja yang memberikan ide, kebanyakan masyarakat hanya diam aja jika adanya sosialisasi perencanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik di pusat desa atau pun di dusun. Padahal pemerintah sangat mengharapkan turut serta masyarakat untuk perencanaan pembangunan, agar pemerintah desa bisa membangun wilayah daerah kususnya Desa Mekar Raya sesuai dengan keinginan masyarkat desa tersebut”.]

Dari jawaban Kepala Desa Mekar Raya penulis bisa menyimpulkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa Mekar raya tidak sesuai dengan apa yang diartikan dalam partisipasi masyarakat. Karena kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam ide, gagasan, pikiran dan tenaga untuk proses perencanaan pembangunan fisik di desa. Dari jawaban Kepala Desa, peneliti melakukan harus mencari tahu apa yang dikatakan Kades benar atau salah, peneliti pun harus melihat keadaan dilapangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga Desa Mekar Raya yang berinisial AG...dengan pertanyaan apakah masyarakat pernah di undang dalam pertemuan seperti musrembangdes untuk membicarakan perencanaan pembangunan fisik di Desa Mekar Raya?...

*“... Kada'ng kepala desa monik ka rumah sikok-sikok yang aba dalam musrembangdes dan mun onya madeh, kepala desa nitip pesan ka onya rumah neh mun madeh gek ka onya dipah.*

[“... kadang kepala desa langsung datang ke rumah masing-masing masyarakat yang terlibat dalam musrembangdes dan jika masyarakat tidak ada di tempat kepala desa menitip pesan ke sanak keluarga yang dekat dengan rumah masyarakat yang terlibat tersebut”.]

Dan bagaimana masyarakat dalam menyampaikan perencanaan untuk pembangunan fisik di desa?...

*“...dalam perencanaan kegiatan pembangunan fisik, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala RT, BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa yang mampu untuk menentukan kegiatan perencanaan pembangunan fisik yang perlu dilakukan di Desa Mekar Raya ini”.*

Berdasarkan keterangan masyarakat di atas memberikan gambaran bahwa tidak sepenuhnya masyarakat di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua mengerti dan memahami proses pembangunan fisik, kondisi ini adalah suatu hal yang sangat logis mengingat dalam proses perencanaan tersebut sangat berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak menuangkan

pemikiran dan idenya dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pembangunan fisik desa kepada orang-orang yang mereka anggap memiliki kemampuan untuk membangun Desa Mekar Raya.

Demikin juga hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Dusun Banjur EV beliau mengatakan...

*"... mun oko aba rapat, oko me nga'mereti dan mongin nak munyok pongan pemikir, mongin me na peduli onya dan pemosek ko me sasui de'ngan gawe nyan. Soal neh oko me sekolah tinggi golak mun ko munyok pemikir, la'a pemikir ko ngoi suasana rapat me nyaman"*.

[ "... kalau saya mengikuti rapat, saya sering tidak mengerti dan malu kalau mau memberikan suatu pendapat takut tidak ditanggapi dan pertanyaan saya tidak sejalan dengan kegiatan perencanaan pembangunan. Soalnya sayakan tidak memiliki pendidikan yang tinggi takut jika saya memberikan saran, malahan saran saya bikin suasana rapat menjadi tidak nyaman" ].

Pendapat tersebut hampir sama dengan sejumlah masyarakat lain yang saya wawancarai. Padahal memberikan suatu gagasan, saran atau pendapat yang diberikan sesuai atau tidaknya tidak memandang pendidikan antara satu dengan yang lain. Yang penting, pendapat dan saran yang ingin di lontarkan sesuai dengan apa yang di temakan dalam rapat.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam perencanaan program melalui tahapan gagasan, saran atau pun pendapat belum berjalan dengan maksimal dan terciptanya suasana atau iklim yang demokratis. Dimana pada saat rapat musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam ide, saran dan buah pikiran lah yang diperlukan oleh pelaksana kegiatan pembangunan fisik di desa.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu alat untuk menterjemahkan proses partisipasi masyarakat di dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu maka kegiatan atau arah yang akan dicapai perlu adanya dikoordinasi sehingga partisipasi masyarakat bisa meningkat dan perencanaan pembangunan tersebut bisa berjalan

dengan baik. Dalam organisasi, koordinasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan organisasi. Koordinasi merupakan suatu kerjasama antara badan atau aparatur dari pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Bentuk koordinasi itu berupa saling pengertian, saling membantu, saling melengkapi dan saling mengisi. Jika koordinasi kerja tidak ada dalam kegiatan organisasi, tentu setiap unit akan berkerja dengan sendiri-sendiri sehingga akan timbul permasalahan antara unit yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang akan di jalankan.

## 2. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan.

Pembangunan fisik yang ada di desa, selama ini kurang menjadi perhatian masyarakat yang ada di Desa Mekar Raya. Dalam masalah ini adalah pembangunan fisik desa seperti jalan, jembatan dan gedung-gedung pemerintahan yang ada di desa Mekar Raya. Di Desa Mekar Raya tingkat kesadaran masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik masih dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dr awal perencanaan pembangunan dimana hanya sebagian yang mau berpartisipasi untuk menyumbangkan ide, gagasan, dan pikiran yang diadakan dalam rapat oleh Kepala Desa Mekar Raya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adanya pengelola yang baik dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD terhadap bantuan yang dikelola, serta dibutuhkan adanya kejujuran transparansi, respontabilitas, serta akuntabilitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Sehingga menumbuhkan semangat partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya sifat keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat maka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin khususnya kepala desa serta hubungan dengan pelaksanaan pembangunan akan berjalan lebih lancar.

Dalam proses pelaksanaan harus ada laporan pertanggungjawaban yang benar serta dapat di terima oleh masyarakat. Selain itu harus adanya sifat resposnibilitas dari perangkat desa, dalam hal ini

adanya tanggapan yang positif dari pemerintahan desa terhadap usulan atau saran serta kritikan dari masyarakat. Agar semua yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik maka sifat-sifat yang ditunjukkan oleh pemerintah desa harus benar-benar dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mekar Raya, dengan pertanyaan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa?...

*"... tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan cukup bagus. Mampu di perar'ti masyarakat nak bagotong royo'ng nak pelaksanaan pembangunan fisik. Walaupun odeh on'nya yang galak kuang dodop am, nak nian gawe dodop am tiap onu".*

[*"... tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan cukup baik. Bisa dilihat masyarakat mau bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Walaupun ada masyarakat yang sering mendahului atau mementingkan urusan pribadi, serta mendahului kegiatan rutinitas mereka sehari-hari".*]

Dilihat dari pernyataan diatas yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah keadaan ekonominya. Dimana masyarakat susah untuk membagi waktu antara pekerjaan mereka dengan kegiatan gotong-royong dalam pembangunan fisik. Di karenakan masyarakat di Desa Mekar Raya sebagian besar mata pencarian mereka adalah petani karet. Maka dari itu penulis turun kelapangan dan mencari bukti apakah benar yang dikatakan Kades dengan kondisi keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat Desa Mekar Raya yang berinisial AG...

*"... kelaba neh denak basedia o'nak najak ngalaku gawe nyak pembangunan fisik dalam bentuk partisipasi masyarakat, karna odeh kegiatan pembangunan di kampong neh yang sebenar neh make tenaga semuyak onya dan denak monik nak berpartisipasi sereta menyompatkan diri dan tulang urat'neh.*

[*"...sebagian besar mereka menyatakan bahwa mereka bersedia diajak untuk pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk partisipasi masyarakat, dengan alasan jika desanya ada kegiatan*

pembangunan yang benar-benar memerlukan tenaga dari masyarakat setempat, maka mereka akan hadir atau ikut berpartisipasi serta bersedia meluangkan waktu dan tenaga mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah desa jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di daerah dusun, begitu juga pihak aparat desanya mereka hanya mengadakan rapat saja tetapi mereka tidak melakukan pembinaan dan pemahaman tentang pembangunan fisik yang di laksanakan".]

Proses sosialisasi pelaksanaan pembangunan merupakan penyampaian kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan atau pedoman atau pun petunjuk kerja dalam intruktur atau arahan. Dimana dalam mensosialisasikan harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, karena pesan yang tidak jelas dan tidak dipahami akan mengakibatkan masyarakat semakin bingung dan tidak jelas. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan atau gotong-royong akan menimbulkan kegagalan dan tidak terlaksana dengan baik.

Sebagai contoh adalah dalam pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung pemerintah. Didalam pancaindra peneliti ada beberapa bangunan fisik seperti pembangunan jalan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antara desa terdapat jalan yang rusak parah berjarak 120 meter. Jadi masyarakat diajak untuk menimbun jalan tersebut dengan batu atau kerikil agar jalan tersebut dapat dilewati dengan lancar. Adapun kegiatan seperti ini dilaksanakan pada hari libur yaitu hari minggu sore, karena mengingat masyarakat Desa Mekar Raya rata-rata berpotensi sebagai petani jadi waktu yang efektif dapat digunakan adalah hari minggu sore.

Selain memperbaiki atau menimbun jalan yang berlubang masyarakat Desa Mekar Raya juga diajak untuk ikut memperbaiki jembatan yang rusak. Adapun jembatan yang rusak parah di Desa Mekar Raya, ada tiga (7) buah dan jembatan yang tidak terawat dengan baik ada dua (2) jembatan. Empat (4) di antaranya panjang lima (5) meter dan lebar dua (2) meter. Satu (1) jembatan panjang tujuh (7) meter dan lebar tiga (3), dua (2) jembatan panjang tujuh (7) meter dan lebar lima (5) meter. Adapun jembatan tersebut lima (5) jembatan menggunakan kayu, dan dua (2) jembatan sudah menggunakan semen cor. Kondisi jembatan yang rusak tersebut sangat

mengganggu jalannya lalu lintas antara dusun dan antara desa.

Jadi jembatan ini tidak sepenuhnya ditangani oleh masyarakat desa, tetapi sebagian masyarakat ikut memperbaiki dengan menyumbang papan, paku, serta peralatan yang mendukung kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat untuk memperbaiki jembatan ini tidak setiap hari minggu akan tetapi pada saat ada dana atau biaya pemeliharaan dari pemerintah desa.

Selain itu juga masyarakat di ajak untuk pelaksanaan pembuatan gedung-gedung pemerintahan seperti gedung pertemuan, gedung kantor camat, gedung pres karet dan gedung sekolah. Di lihat dari pandangan dan alat kamera peneliti ada beberapa gedung yang rusak karena tidak terawat dengan baik salah satunya gedung puskesmas. Itu di karena tidak adanya partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut. di sebabkan masyarakat sedikit sekali yang mau berpartisipasi untuk perbaikan gedung puskesmas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis ke masyarakat Desa Mekar Raya yang berinisial AG...tidak terawatnya gedung puskesmas tersebut dikarenakan masyarakat tidak ikut berperan penting di dalam pembangunan gedung perkesmas tersebut di karenakan...

*“... jarang onya make puskesmas. mun denak ingin barobat denak langsung ka’rumah perawat yang bagawe di gedung puskesmas nyan. Masyarakat ngoto me kola di libatkan nyak mem’bangun gedung- gedung di desa. Bokah pembangunan pamerintah yang digawe onya luar, padahal onya dop soju mampu nak batukang.*

[“...jarangnya masyarakat menggunakan gedung puskesmas tersebut. Disebabkan, jika masyarakat ingin berobat harus pergi langsung ke tempat rumah perawat yang kerja di gedung puskesmas tersebut. Serta masyarakat Desa Mekar Raya pun jarang dilibatkan untuk pembangunan gedung-gedung di desa. Banyak pembangunan gedung-gedung pemerintahan di desa yang di kerjakan oleh orang luar, padahal banyak masyarakat

Desa Mekar Raya yang paham dan pandai di dalam pertukangan”.]

Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa memberi kesimpulan bahwa sebagian pelaksanaan pembangunan gedung-gedung pemerintah, masyarakat tidak jarang berperan dan tidak tahu fungsi dari gedung-gedung tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan TP dengan pertanyaan bagai mana kegiatan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan fisik di Desa khususnya dalam kegiatan gotong-royong...

[“...jarang pemerintah mengajak masyarakat untuk kegiatan gotong-royong karena mereka susah mengatur waktu masyarakat untuk melakukan kegitan gotong-royong tersebut”. hal ini dibenarkan oleh YT selaku tokoh pemuda.. “...memang jarang aparat desa mengadakan gotong-royong karena masyarakat sedikit yang mau hadir di dalam pelaksanaan, dikarenakan masyarakat pergi kerja ke kebun karet mereka masing-masing”].

Dilihat dari keterangan di atas masih kuranya komunikasi pemerintah desa terhadap masyarakat Desa Mekar Raya. Karna kumunikasi adalah salah satu dasar untuk mendapatkan keberhasilan. Tanpa adanya komunikasi setiap tindakan tidak akan berjalan desan semestinya

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Mekar Raya dalam pelaksanaan pembangunan fisik, juga dapat diperoleh dari gambaran atau kesedian masyarakat untuk ikut serta, adapun gambaran tersebut adalah dilihat dari sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekar Raya, baik itu uang, tenaga, pikiran, serta saran atau keritikan yang sifatnya membangun. Hal ini dianggap penting karena pada dasarnya segala pelaksanaan suatu pembangunan pasti memperhitungkan dana, terutama dalam hal pelaksanaan teknis dilapangan.

Kesedian masyarakat dalam memberikan bantuannya dalam memberikan bantuan dana, itu semua demi kepentingan pelaksanaan pembangunan yaitu merupakan suatu partisipasi dimana sangat diharapkan demi pencapaian tujuan pelaksanaan

pembangunan serta kelancaran pembangunan. oleh sebab itu perlu tinjauan bagaimana kesediaan masyarakat Desa Mekar Raya untuk memberikan bantuannya dalam bentuk materi terhadap jalanya pelaksanaan pembangunan fisik di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat desa dan dengan Pak Rukun Tetanga (RT) di Desa Mekar Raya, dalam pelaksanaan pembangunan fisik mereka menyatakan bahwa bersedia memberikan bantuan berupa sumbangan dana atau materi secara swadaya atau sukarela demi pelaksanaan pembangunan fisik di desanya. Biasanya proses pelaksanaan pengalangan dana untuk partisipasi dalam pembangunan fisik tersebut dilakukan langsung oleh ketua RT dan bendahara RT, serta tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dapat dipercaya. Salah satu caranya dengan mendatangi rumah-rumah warga Desa Mekar Raya untuk meminta kesediaan masyarakat dalam memberikan bantuan dana dalam partisipasi untuk pembangunan fisik di desa.

Akan tetapi tidak lepas pula dari tanggungjawab pengurus yang mengelola dana, di mana sifat masyarakat Desa Mekar Raya tidak mau member dana apabila pemberian mereka tidak dijalankan seperti di dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

## E. PENUTUP

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik, dalam hal ini masyarakat Desa Mekar Raya masih kurang berpartisipasi secara aktif, dikarenakan pemerintah desa belum melaksanakan perencanaan dengan baik, itu bisa dilihat dari cara kepala desa mengundang aparat pemerintah desa dan masyarakat desa masih menggunakan sistem pesan mulut. Masyarakat pun di dalam musyawarah mereka jarang memberikan pendapat atau ide, gagasan, pikiran dan tenaga, dengan itu masyarakat menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD serta Tokoh-tokoh masyarakat tanpa terlibat secara aktif dalam

proses perencanaan pembangunan fisik tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik ini tidak lepas dari pendidikan masyarakat yang rendah. Oleh karena itu saran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan fisik di Desa, untuk aparat Pemerintah Desa Mekar Raya diharapkan selalu merencanakan persiapan perencanaan pembangunan secara teoritis kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengerti dan tidak takut dalam menyampaikan ide di dalam rapat untuk pembangunan desa. Serta masyarakat diharapkan untuk mengikuti peranan terhadap perencanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak sepenuhnya menyerahkan pembangunan kepada pemerintah desa, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, masyarakat jarang melakukan kegiatan gotong-royong dikarenakan masyarakat belum bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan. Walaupun dari beberapa wawancara kepada masyarakat bahwa masyarakat siap untuk membagikan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan, nyatanya di lapangan sedikit sekali masyarakat yang berperan dalam partisipasi dikarenakan kesibukan kerja. Lemahnya dalam mensosialisasikan dan kurang mengertinya masyarakat dalam penjelasan aparat desa serta jarang ajakan dari pemerintah desa juga ikut berpengaruh dalam lemahnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekar Raya. Oleh karena itu saran Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa, untuk aparat Pemerintah Desa Mekar Raya diharapkan untuk lebih tegas dan terperinci untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Sehingga masyarakat tidak merasa rugi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pelaksanaan pembangunan fisik. Serta masyarakat diharapkan untuk berperan terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga dalam

kegiatan yang diberikan oleh pemerintah desa bisa berjalan dengan maksimal

## F. REFERENSI

Basrowi, Widya.2008. “ *Pengaruh Perilaku Kepemimpinana Pada Kinerja pegawai*”. (Jurnal) Ilmu Administrasi Negara. Volume 8 No.2.Juli 2008:73-82.

Godschalk, D.R. 2004. *Land use planning challenges: Copping with conflicts in visions of sustainable development and liveable communities*. Journal of the American Planing Association 70 (1) pp. 5-13.

Ismadi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.

Mantysalo, Raine. 2005. *Approaches to Participation in Urban Planning Theories*. In Zetti, Iacopo & Brand. (2005) *Rehabilitation of Suburban Areas – Brossi and Le Piagge*.

Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajahmada Press.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, Gunung Agung.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.